

Analisis *Monolithic National Culture* dalam Rekonseptualisasi *Double Movement* (Studi Kasus: Pancasila di Indonesia)

Nur Utaminingsih

Dosen Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

Email: nur.utaminingsih@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Rekonseptualisasi Blad (2008) terhadap “proteksi ekonomi nasional” menjadi “proteksi kebudayaan nasional yang bersifat monolitik” merupakan solusi ideal untuk kerangka *double movement* Polanyi (1944) di rezim neoliberal. Model analisis sekunder adalah model yang secara jelas diterapkan dalam penelitian ini. Untuk penelitian kualitatif, model ini masih baru. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan yang semakin luas dan semakin maraknya penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, ada beberapa peneliti yang menggunakan analisis sekunder tergantung kebutuhan proses analisis penelitiannya. Kebutuhan atas kembali kuatnya negara sebagai pemegang kendali atas *double movement*-nya kemudian disadari sebagai fungsi mediasi menuju stabilitas sosial. Namun sangat disayangkan, upaya *monolithic national culture* tidak berjalan lancar di Indonesia dalam rezim neoliberal. Perspektif materil menjadi pandangan dominan yang menganggap setiap potensi sebagai komoditas. Pancasila merupakan instrumen ideal sebagai penyeimbang *movement in-* dan *movement out-*Indonesia karena juga merupakan ideologi dasar kerakyatan Indonesia. Hanya saja potensi kekuatan ini cenderung di-anak kedua-kan karena pertimbangan atas ekonomi nasional senantiasa menjadi prioritas Indonesia dalam setiap kebijakan dan sikapnya dalam suatu keputusan politik.

Kata Kunci: Pancasila, Kebudayaan Nasional, Indonesia, Neoliberalisasi

PENDAHULUAN

Di permulaan abad ke-18, dinamika transnasional diwarnai integrasi, baik negara maupun aktor non-negara, dalam pasar liberal yang cenderung merugikan. Kondisi merugikan ini berdampak pada reaksi publik yang terus menuntut hak perlindungan sosialnya. Negara menjadi satu-satunya tempat meminta perlindungan dan tentu bertanggung jawab untuk fenomena ini. Terdapat ketergantungan antar-komponen dalam dinamika transnasional yang sebelumnya telah dikonsepsikan pada *triadic interaction* oleh Blad (2008).

Polanyi memberi optimisme dalam prospek stabilitas sosial dari *double movement* transnasional ekonomi jika kontrol institusi negara tetap optimal. Namun, Blad melihat terjadinya *contradictory socio-econ demand* (Blad, 2008: 51-54) dalam perkembangan dinamika transnasional. Tiga kontradiksi besar yang dilihatnya, yaitu: (1) peran negara yang semakin kecil dan seringkali menjadi dilema dalam *double movement*; (2) tren perubahan strategi mediasi ekonomi klasik cenderung ke sektor ekonomi; dan (3) agenda ekonomi liberal menghasilkan realita banyaknya kebijakan yang bersifat proteksi, yang lalu menjadi kendala agenda liberalisasi ekonomi.

Kontradiksi ini menjadi gejala sosial dan ekonomi yang mengiringi transformasi rezim ekonomi liberal menuju neoliberal. Terjadi pergeseran ide yang semakin memberi ruang lebih bagi pasar untuk mengontrol dan mengambil untung atas sistem yang berlaku. Model

sosial dalam *Welfare State*¹ pada rezim liberal beralih menjadi model sosial yang didominasi oleh kultur pertumbuhan ekonomi dengan karakteristik pengutamaan efisiensi (George, 2002: 3-9).

Transformasi kultur ekonomi yang semakin terintegrasi pasar global berdampak pada perubahan sifat hubungan antara populasi nasional dan institusi negara. Dinamika dan komponen dalam *double movement* tetap sama, tetapi penerjemahannya dalam konsep ketika digunakan untuk menganalisis mekanisme transnasional rezim liberal berbeda dengan rezim neoliberal. Pelemahan negara² menuntut pemberdayaan sektor alternatif untuk mempertahankan otoritas legitimasi dari publik sebagai dasar *power*-nya. Rekonseptualisasi Blad terhadap “proteksi ekonomi nasional” menjadi “proteksi kebudayaan nasional yang bersifat monolitik” merupakan solusi ideal untuk kerangka *double movement* di rezim neoliberal. Hal inilah yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam analisis tulisan ini, yaitu bagaimana kemudian “proteksi kebudayaan nasional yang bersifat monolitik diadaptasikan masuk dalam konsep *double movement* Polanyi untuk menganalisis

¹ Susan George beberapa kali menganalogikan model *Welfare State* dengan konsep Demokrasi Sosial. Hal ini dikarenakan pada penerapannya di Eropa selama *Bretton Woods System* dianggap cukup efektif mengurangi disparitas ekonomi, menghapuskan ketegangan dan kegelisahan hidup, serta memperbaiki kohesi nasional. Hal tersebut dicapai tanpa mengurangi kebebasan individu. Disimpulkan dari pembahasan Susan George, dalam bukunya: Susan George, *Republik Pasar Bebas: Menjual Kekuasaan Negara, Demokrasi, dan Civil Society kepada Kapitalisme Global*, Jakarta, INFID: 2002, hlm. 4.

² Dalam tulisannya, Blad menggunakan istilah “*state decline*” untuk merujuk pada fenomena pelemahan negara.

bagaimana Pancasila di Indonesia saat menghadapi berbagai tantangan global dalam pengaruh neoliberalisme.

METODOLOGI

Secara umum, terdapat tujuh tahapan besar dalam proses penelitian, yaitu (1) Menentukan topik, (2) Menentukan pertanyaan penelitian, (3) Desain penelitian, (4) Pengumpulan data, (5) Proses analisa data, (6) Proses interpretasi data, dan (7) Sosialisasi atau publikasi.³ Dalam metode penelitian yang berbeda baik penelitian kuantitatif, maupun penelitian kualitatif, setiap tahapan ini memiliki karakteristiknya tersendiri. Beberapa tahapan ini disederhanakan dalam pendekatan deduktif⁴ yang pada umumnya dipakai dalam metode penelitian kuantitatif, dan pendekatan induktif⁵ yang pada umumnya dipakai dalam metode penelitian kualitatif.⁶

Penelitian sosial dengan metode bagaimanapun tetap menekankan fokus penelitiannya pada realitas

³ Diringkas dari W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Fifth Edition*, United States, Pearson Education, Inc: 2003, hal. 12-13

⁴ Teori deduktif merupakan pandangan umum dari sifat hubungan antara teori dan penelitian sosial. (disimpulkan dan dirumuskan dari Figure 1.1, Bryman, 2004: hlm. 8-9)

⁵ Pendekatan Induktif merupakan pendekatan yang melibatkan dan menggambarkan proses generalisasi kesimpulan dari pengamatan selama proses penelitian. (disimpulkan dan dirumuskan dari Figure 1.2, Bryman, 2004: hlm. 9-10)

⁶ Diringkas dan diterjemahkan dari Alan Bryman, *Social Research Methods, Third Edition*, New York, Oxford University Press Inc.: 2004, hlm. 8-11

sosial atau fenomena faktual. Sedangkan, realitas sosial dalam metode penelitian kualitatif diterjemahkan sebagai interpretasi subjektif untuk menghasilkan gagasan dalam perumusan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti melalui rekonstruksi sosial. Penelitian Kualitatif memiliki hakikat dasar dengan penekanan yang lebih besar terhadap kata-kata daripada kuantifikasi data.

Pengertian data secara umum dalam penelitian sosial adalah konseptualisasi yang didapat dari fenomena faktual dan dikatakan atau ditulis dalam istilah. Misalnya: 1 milyar, tidak terhingga, untuk data kuantitatif; dan banyak, untuk data kualitatif. Orisinalitas adalah karakter dasar dari metode penelitian kualitatif. Tidak dapat dihindari, diasumsikan tidak sama dengan yang lain, dan tidak bisa dipecah dengan karakter lain, merupakan ciri dasar dari orisinalitas tersebut. Beberapa peneliti kualitatif memopulerkan orisinalitas dalam penelitian kualitatif ini dengan sebutan 'unik'.

*Qualitative data as an 'attractive nuisance', because of the attractiveness of its richness, but the difficulty of finding analytic paths through that richness.*⁷ Karena unik, data dan analisa kualitatif dikenal kaya dan beragam. Akan terdapat berbagai macam klasifikasi kategori dalam pengkodean dengan metode penelitian kualitatif. "Handle your data, interpret your analysis, for getting to your mainpoint," pesan Bryman dalam membuka pembahasan mengenai Analisa dan Penulisan Laporan Kualitatif.

⁷ M. B. Miles, "Qualitative Data as an Attractive Nuisance", *Administrative Science Quarterly*, 24: 1979, hlm. 590-601

Model analisis sekunder adalah model yang secara jelas diterapkan dalam penelitian ini. Untuk penelitian kualitatif, model ini masih baru. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan penelitian kualitatif yang semakin luas dan semakin maraknya penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, ada beberapa peneliti yang menggunakan analisis sekunder tergantung kebutuhan proses analisis penelitiannya.

Bryman membagi dua jenis model analisis sekunder⁸: (1) *The secondary analysis of data that have been collected by other researchers; and* (2) *The secondary analysis of data that have been collected by various institutions in the course of their business.* Intinya, analisis sekunder merupakan proses analisis terhadap data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak lain tapi hasil analisis data tersebut dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersangkutan.

Model laporan analisis sekunder dalam penelitian kualitatif terdapat dalam beberapa jenis laporan penelitian kualitatif yang bersifat kompleks dengan ruang lingkup penelitian yang luas. Atau, bisa juga didapat dalam laporan penelitian kualitatif yang membahas tentang kronologis historis atau perkembangan sebuah gagasan akan fenomena faktual yang mengalami rekonstruksi pemahaman sosial.

⁸ Bryman, Op. Cit., hlm. 201

PEMBAHASAN

Rekonseptualisasi Blad terhadap konsep Double Movement Polanyi

Polanyi (1944) mendeskripsikan mekanisme utama dari dinamika transnasional dalam konsep *double movement*-nya. Dinamika tersebut menggambarkan bahwa sistem ekonomi global tidak dapat bangkit atau bertahan tanpa dukungan integrasi institusi negara “ke luar”. Sedangkan, perlindungan populasi nasional⁹ juga hanya dapat dijamin oleh proteksi ekonomi nasional negara yang bersangkutan. Negara dibutuhkan sebagai penyeimbang antara *movement in*-¹⁰ dan *movement out*-¹¹ yang diakui oleh Polanyi berbahaya jika hanya didominasi oleh kesuksesan pihak tertentu saja.¹²

Blad membaca konsep *triadic interaction* dalam kerangka *double movement* Polanyi. Komponen-komponen dalam konsep ini, yaitu sistem ekonomi global, institusi negara, dan populasi nasional (publik) terangkai satu sama lain dalam interaksi yang saling mematkan. Oleh karena itu, setiap komponen tersebut memiliki fungsi

⁹ Populasi nasional semakna dengan “publik” dalam tulisan ini.

¹⁰ Dengan tetap mempertahankan bentuk *Keynesian Welfare State*, sebuah sistem yang diciptakan melalui ukuran redistributif dalam pelayanan sosial dan perkembangan ekonomi global.

¹¹ Dengan tetap aktif dalam pasar kapitalisme liberal, khususnya dalam sistem moneter.

¹² Pendapat ini didukung oleh Ruggie dalam argumennya tentang *embedded liberalism* dalam sistem Bretton Woods System; dalam John Gerard Ruggie, “International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar World,” *International Organizations*, 36(2): 1982, 379-415.

mediasi¹³ sebagai solusi penyeimbangannya. Dominasi atas kontrol salah satu komponen menjadi penentu utama efektivitas mediasi tersebut. Sayangnya, dinamika transnasional kerap diwarnai keadaan dimana negara cenderung lebih tidak bisa melindungi publik karena terbebani aturan internasional dalam integrasi sistem ekonomi global.

Pelemahan Negara dalam Globalisasi

Globalisasi menjadi salah satu bentuk institusi neoliberal. Deregulasi dalam pembebasan modal, tenaga kerja, dan pasar komoditas merupakan agenda neoliberal yang perlu dipenuhi negara karena terintegrasi sistem ekonomi global. Kaum neoliberal mendefinisikan sesuatu yang bersifat publik sebagai *ipso facto*; “tidak efisien” (George, 2002: 48, 52). Logikanya, prioritas dalam privatisasi dan keuntungan kapital akan menghasilkan pendapatan orang kaya semakin tinggi, dan akan menarik investasi yang lebih banyak, alokasi sumberdaya yang lebih baik, sehingga menimbulkan lapangan kerja yang luas dan berpeluang mewujudkan kesejahteraan bagi setiap orang. Dengan demikian, hak publik atas pelayanan dan perlindungan sosial cenderung dikesampingkan karena tidak efisien, butuh modal besar dan memang bukan karakter dari rezim neoliberal.

Percepatan globalisasi dalam rezim neoliberal berdampak pada pelemahan otoritas negara.

¹³ Medasi ini ditujukan pada kemampuan setiap komponen untuk menyeimbangkan sikap dengan manajemen yang ideal terhadap “*material foundation of society*”.

Schwartzmantel (1998: 60-61) mengilustrasikan dominasi atas transformasi struktur global yang tadinya tradisional menjadi modern. Analisis lainnya juga disimpulkan Jessop (1993) bahwa terdapat peralihan ideologi struktural dari "*Keynesian welfare national state*" menjadi "*Schumpeterian workfare post-national regime*" dalam transformasi neoliberal. Model negara "*Schumpeterian*" cenderung lebih mengedepankan fleksibilitas dan kemampuan bersaing (Jessop, 2002). Bahkan, negara seringkali terpaksa mengurangi anggaran untuk pelayanan sosialnya agar berhasil, atau minimal selamat bertahan, dalam integrasi global.

Aktor global dengan power ekonomi yang lebih besar memberi sumbangsih dalam bentuk tekanan bagi setiap negara menjadi argumen dari beberapa pemikir kritis globalisasi (Blad, 2008; Camilleri and Falk, 1992; Horsman and Marshall, 1994; Ohmae, 1995; dan Robinson, 2004). Tekanan pasar neoliberal seperti ini sudah mengusik tradisi ekonomi nasional. Selain itu, tekanan ini juga dianggap mengusik perlindungan sosial bagi publik suatu negara. Terlebih jika terjadi keberpihakan dalam perumusan dan penentuan kebijakan hanya menguntungkan pihak kapitalis saja.

Polanyi (1944) dan Blad (2008) sepakat bahwa negara perlu berperan sebagai institusi mediator antara tekanan pasar global dan perlindungan publiknya. Perkembangan pandangan atas peran negara ini berdasar pada pemikiran Marx yang menyatakan bahwa negara merupakan moderator atas *power* yang berdiri di atas masyarakat dalam mengatur stabilitas sosial. Selain itu, Weber (1978) pun berpesan bahwa negara merupakan

pengatur atas regulasi dan administrasi kebijakan yang akhirnya ditujukan untuk organisasi sosial.

Idealnya, kepercayaan publik merupakan *power* penentu terhadap legitimasi otoritas suatu negara. Untuk menjaga dan mempertahankannya, negara memiliki tanggung jawab sosial dalam bentuk pelayanan dan perlindungan publik. Pelemahan otoritas negara dalam rezim neoliberal berdampak pada dominasi sistem ekonomi global, baik dalam *movement in-* maupun *movement out-*. Hak sosial yang seringkali dikesampingkan menyebabkan kepercayaan publik terhadap negara semakin berkurang. Munculnya pergerakan sosial dalam masyarakat yang menuntut perubahan, terkhusus yang berorientasi separatis, menjadi ancaman domestik negara yang dipicu oleh dinamika transnasional dalam rezim neoliberal.

Dinamika Local Movement di Indonesia

Menurut para pemikir, gelombang kekerasan yang melanda Indonesia, seperti konflik komunal di Aceh, Poso, Maluku, maupun Papua, terjadi karena adanya bibit-bibit pelemahan struktur negara Indonesia. Suatu negara yang lemah sangat rentan terhadap instabilitas politik dan sosial. Hal ini disebabkan oleh kebijakan politik yang diambil sering terkondisikan oleh instabilitas politik, krisis legitimasi, lemahnya identitas nasional. Jika tidak segera ditindaki, kemiskinan ekonomi dan kontrol eksternal akan sangat mengancam kedaulatan ekonomi, politik dan sosial suatu negara (Jackson, 2001: 65-68).

Dalam catatan sejarah, Aceh dapat dikatakan

sebagai daerah yang tidak pernah lepas dari konflik. Pasca kemerdekaan Indonesia, konflik pertama antara Aceh dan pemerintah pusat terjadi pada saat gerakan Darul Islam (DI/TII) pimpinan Tengku Daud Beureuh diproklamlirkan tahun 1953 (Usman, 2003: 124). Pemberontakan ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat Aceh terhadap kebijakan peleburan Provinsi Aceh dalam Provinsi Sumatra Utara. Kondisi tersebut mendorong tokoh masyarakat Aceh untuk bereaksi keras. Sehingga, terbentuklah pemberontakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik ini masih dapat diredakan dengan diberikannya status “Daerah Istimewa” bagi Aceh dengan otonomi luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan pada 1959 (Crisis Group Asia Report, 2007: 139).

Proklamasi Hasan di Tiro terhadap kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali memicu konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat. Kemarahan masyarakat lokal atas penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang didominasi orang Jawa dan eksploitasi kekayaan alam Aceh yang tidak memberikan hasil yang adil bagi masyarakat setempat menjadi pemicu konflik ini. Legitimasi kekuasaan Orde Baru banyak disandarkan pada kemampuan Pemerintah dalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi pada angka yang tinggi. Dalam prakteknya, usaha untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi ini mengorbankan aspek keadilan dan kurang memerhatikan aspek keberlanjutan. Eksploitasi sumber daya alam yang terjadi secara besar-besaran serta kurang memerhatikan kepentingan masyarakat lokal kemudian menjadi tak terhindarkan (Shaw, 2008).

Model analisis induksi terhadap gerakan perlawanan juga digunakan Schulze (2002) untuk menganalisis perang saudara yang terjadi di Maluku. Konflik di Maluku sering digambarkan sebagai permusuhan berlatar agama antara umat Muslim dan Kristen. Latar belakang pemicu konflik ini berawal sejak zaman penjajahan Belanda. Penjajah memberi kemudahan akses pendidikan dan ruang politik bagi umat Kristen. Sedangkan, umat Muslim mayoritas hanya menjadi pedagang dan pebisnis kecil.

Bibit konflik ini semakin rentan menyusul kebijakan migrasi sukarela pemerintah pada tahun 1970-an. Transmigran dari Bugis (salah satu kelompok etnis mayoritas di Sulawesi), Buton, dan Makasar semakin menambah populasi umat Muslim di Maluku. Kondisi mayoritas ini menjadi pendukung bagi kelompok masyarakat pendatang¹⁴ sehingga dapat menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan yang sebelumnya selalu diisi oleh umat Kristen. Hal ini selanjutnya meluas dan menjadi konflik sosial berlatar agama yang ditunjukkan dengan penyerangan-penyerangan terhadap gereja maupun mesjid.

Ditengah-ditengah konflik yang semakin memburuk dan ketidakmampuan pemerintah menangani konflik, Front Kedaulatan Maluku (FKM) bangkit pada tahun 2000. Kelompok separatis yang mengidentikkan kelompoknya dengan agama Kristen ini ingin

¹⁴ Masyarakat pendatang dari luar Maluku, yang didatangkan melalui kebijakan transmigrasi sukarela pemerintah. Kebanyakan dari Sulawesi dan Jawa.

menyatakan kemerdekaan dengan memisahkan Maluku Selatan dari Indonesia. Berawal dari kecemburuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, timbul kekhawatiran umat Kristen bahwa kedudukannya akan tergerus dan tergantikan oleh umat Islam. Gerakan FKM memiliki tujuan utama untuk membentuk suatu negara Kristen yang merdeka.

Contoh lain yang juga menunjukkan gerakan perlindungan masyarakat karena negara dan pemerintah dianggap gagal dalam memenuhi tuntutan perlindungan bagi masyarakat, yaitu konflik di Poso. Menurut Aditjondro (2004), konflik di Poso ini lebih bersifat etnis ketimbang agama, yang ditunjukkan oleh upaya dari komunitas-komunitas pribumi Poso, khususnya suku-suku Lore, Pamona, dan Mori yang memperjuangkan kedaulatan mereka dikampung halaman mereka sendiri. Kedaulatan mereka dirasakan sudah terancam oleh dominasi para migran dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Terutama setelah pembangunan jalan raya Trans-Sulawesi yang mempermudah arus migrasi dari Selatan ke Kabupaten Poso yang kaya dengan berbagai sumber daya alam.

Para milisi yang merupakan penduduk asli Poso ini memiliki tujuan perang yaitu untuk merebut kembali tanah adat mereka dari para pendatang yang telah mencemarkan tanah adat mereka. Kelak para pendatang dianggap mengingkari Maklumat Raja Talasa Tua, yang merupakan Raja Poso yang terakhir. Kemudian, secara kebetulan, komunitas pribumi yang beragama Kristen adalah yang paling tergesur dari

pusat-pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya. Sehingga, hal inilah yang mendorong komunitas pribumi ini untuk bangkit dan merebut kembali tanah adat mereka.

Gerakan lokal yang memicu konflik dan menuntut kemerdekaan juga terjadi di Papua. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang muncul pada 1965 merupakan sarana perlawanan bersenjata bagi rakyat asli Papua yang menuntut kemerdekaan terhadap Papua karena merasa tidak senang atas tidak diundangnya perwakilan dari rakyat Papua pada negosiasi perjanjian New York (Jereski & Djuli M.N., 2002: 39). Perjanjian negosiasi New York yang dilaksanakan pada 1962 ini dihadiri oleh pemerintah Belanda dan Indonesia, di mana keputusan dari perjanjian ini adalah mengharuskan Belanda untuk meninggalkan Papua dan menyerahkan kekuasaan atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) untuk periode 6 tahun.

Periode ini menjadi masa transisi untuk menentukan keinginan rakyat Papua apakah ingin merdeka atau integrasi dengan Indonesia dalam suatu proses pemungutan suara yang partisipatif.. Karena tidak diikutsertakan dalam negosiasi perjanjian New York ini, rakyat Papua menjadi kecewa dan merasa tidak penuh hak sipil dan politiknya. Oleh karena itu, kemerdekaan dirasakan sebagai hak yang masih perlu dituntut dan diperjuangkan melalui gerakan OPM.

Pada tahun 1973, secara resmi Papua dimasukkan ke dalam Negara Indonesia melalui hasil pemungutan suara yang disahkan dengan Resolusi PBB yang menyetujui pemindahan kekuasaan Papua ke tangan

Indonesia.¹⁵ Keputusan ini memperburuk keadaan di mana rakyat Papua merasakan perasaan dikhianati yang sebelumnya percaya bahwa aktor-aktor eksternal, yaitu Amerika, Belanda, dan PBB mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung penyelesaian konflik Papua.

Konflik ini kemudian diperburuk dengan larangan lagu kebangsaan Papua dan implementasi kerjasama pemerintah Indonesia dengan perusahaan pertambangan milik Amerika yaitu Freeport McMoran untuk menambang pasokan tembaga terbesar di dunia yang berlokasi di Timika. Lokasi ini menjadi tempat pusat protes terhadap eksploitasi sumber daya alam Papua. Pemerintahan Indonesia juga memulai program transmigrasi di mana penduduk dari Jawa atau daerah yang padat pemukiman dipindahkan ke Papua. Kebijakan ekonomi dan politik ini menciptakan perubahan di komunitas Papua yang menjadi sumber ketegangan (Jereski & Djuli, 2002: 43). Kekhawatiran dan ketakuran masyarakat lokal agar tidak di-marjinal-kan semakin besar.

Pancasila untuk Indonesia

Keadilan dan kesejahteraan sosial tidak diprioritaskan karena dianggap sebagai “hasil kemudian” dalam rezim neoliberal. Pertumbuhan ekonomi

¹⁵ Resolusi PBB 2504, *Agreement between the Republic of Indonesia and The Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea*; diakses dari <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/256/38/IMG/NR025638.pdf?OpenElement>, pada 1 Desember 2014 pukul 22.00 WIB.

merupakan indikator yang perlu dikejar terlebih dulu. Oleh karena itu, tujuan utama dari setiap strategi ekonomi-politik pada rezim neoliberal saat ini adalah pertumbuhan ekonomi. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, negara perlu memegang kendali atas *double movement*-nya sebagai fungsi mediasi menuju stabilitas sosial (Blad, 2002: 52).

Gerakan sosial yang bersifat lokal dan melawan dicontohkan Blad sebagai fenomena umum dalam rezim neoliberal. Ketidakpuasan mereka terhadap negara yang tidak melaksanakan tanggung jawab perlindungan sosialnya memicu inisiatif untuk berjuang sendiri. Kelompok etnis dan 'bangsa tanpa negara' cenderung menuntut otonomi yang lebih besar (Guibernau, 1999). Giddens (2000) lalu memprediksikan konflik dalam konteks lokal akan lebih meningkat ketimbang antara negara-bangsa.

Blad mengajukan pemanfaatan aspek "kebudayaan nasional" sebagai penyeimbang perlindungan sosial suatu negara terhadap integrasi sistem ekonomi neoliberal yang semakin menggurita. Hal ini sejalan dengan ide Giddens (2000) tentang penguatan prinsip-prinsip kosmopolitan untuk menjaga *power* negara dalam otoritas legalnya. Sebagai negara multikultur, Indonesia tidak bisa hanya menggunakan simbol sosial umum seperti bahasa, agama, suku, maupun etnis sebagai kebudayaan nasional monolitik untuk menyeimbangi dinamika transnasional dalam rezim neoliberal saat ini.

Ketidakpuasan dan kekecewaan publik merupakan agenda perlindungan sosial yang masih menjadi PR bagi beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia.

Gerakan separatis lokal yang bersifat anarkis, seperti di Aceh, Maluku, Poso, Maluku, Papua dan lainnya merupakan kelompok-kelompok yang mengancam kedaulatan negara. Pancasila, sebagai ideologi kebangsaan yang berdasar atas solidaritas bersama dan gotong royong, seharusnya bisa menjadi pengingat, baik untuk pemerintah dan negara maupun kelompok separatis yang bersangkutan, tentang persatuan dan kesatuan negara.

Polanyi menyederhanakan pemahaman bahwa mekanisme sikap *double movement* memang identik berkembang dalam komunitas modern yang dibawa oleh kultur liberal (Polanyi, 1944) dan neoliberal (Blad, 2008). Untuk Indonesia, budaya penilaian dan penghargaan atas prestasi yang dimasyarakatkan sejak rezim Orde Baru sangat memengaruhi peleburan nilai gotong royong Pancasila.¹⁶ Dalam kultur komunitas modern, pergeseran dan peleburan identitas solidaritas sosial menjadi budaya kompetisi sangat identik (Blad, 2002: 49). Bangsa Indonesia larut dalam kompetisi “yang diskenarionakan” selalu sehat untuk memperoleh penilaian dan penghargaan sebanyak dan sebaik mungkin. Selain itu, bangsa dan negara Indonesia juga sangat aktif dalam berbagai bentuk integrasi yang bersifat global. Meski di beberapa integrasi kerap dirugikan oleh tekanan kepentingan pihak asing.

¹⁶ Merupakan argumen Karsono Harjo Saputra, Dosen Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, yang dimuat di Kompas, 26 November 2014, dalam artikel berjudul “Pancasila: Nilai Gotong Royong Kehilangan Akar Budaya.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yang bermakna “membawa” untuk “Gotong” dan “bersama” untuk “Royong”. Menurut Karsono, setiap tindakan yang melibatkan orang lain kini sangat identik dengan upah. Dilema budaya “upah” yang juga bisa dimaknai sebagai penghargaan atas bantuan kemudian bergeser menjadi hak bagi penerima upah dan tanggung jawab bagi pemberi upah. Pemenuhan hal tersebut dibutuhkan untuk diakumulasikan kembali sebagai modal dalam hubungan sosial berikutnya. Perspektif materil menjadi dominan yang menganggap setiap potensi sebagai komoditas.

Sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, Indonesia tidak dapat memanfaatkan kebudayaan dan/atau identitas yang bersifat materil sebagai kultur nasional yang monolitik. Pancasila merupakan instrumen ideal sebagai penyeimbang *movement in-* dan *movement out-* Indonesia karena juga merupakan ideologi dasar kerakyatan Indonesia. Selain itu, dinamika transnasional neoliberal yang digambarkan Blad untuk keadaan modern saat ini memang memberi efektivitas yang lebih jika Indonesia mendasarkan Pancasila dalam setiap kebijakan dan politik, daripada berusaha menyusun strategi perlindungan ekonomi nasional yang semakin sarat atas kepentingan masyarakat pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George. (2004). *Kerusuhan Poso dan Morowali, Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya*. Jakarta: ProPatria.
- Blad, Cory. (2008). Globalization and The Efficacy of National Culture: A Methodological Framework for Analyzing the Neoliberal State. *International Journal of Social Inquiry*, Volume 1 No. 2: Southern Illinois University.
- Bryman, Alan. (2004). *'Social Research Methods': Qualitative Data Analysis, Third Edition*. New York: Oxford University Press.
- Camilleri, Joseph, & Falk, Jim. (1992). *The end of sovereignty: The politics of a shrinking and fragmenting world*. Adelshort, UK: Edward Elgar.
- George, Susan. (2002). *Republik Pasar Bebas: Menjual Kekuasaan Negara, Demokrasi, dan Civil Society kepada Kapitalisme Global*. Jakarta: INFID.
- Giddens, Anthony (2000). *The Third Way and Its Critiques*. Cambridge: Polity Press.
- Guibernau, Montserrat. (1999). *Nations Without States*. Cambridge: Polity Press.
- Horsman, Andrew, & Marshall, Matthew. (1994). *Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality (2nd ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- International Crisis Group. (2007). *Aceh: Komplekasi Paska Konflik*. Crisis Group Asia Report No. 139.
- Jackson, Richard. (2001). *The State and Internal Conflict*.

Australian Journal of Internal Affairs, Vol.55, No.1, 65-68.

Jereski, Robert, & M.N., Djuli. (2002). Prospects for Peace and Indonesia's Survival. *The Brown Journal of World Affair*, 39.

Jessop, Bob. (1993). Towards A Schumpeterian Workfare State? Preliminary Remarks on Post-Fordist Political Economy. *Studies in Political Economy*, Edisi 40

Jessop, Bob. (2002). Globalization and the National State. Dalam Stanley Aronowitz & Peter Bratsis (eds.). *Paradigm lost: State theory reconsidered*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Miles, M.B. (1979). 'Qualitative Data as an Attractive Nuisance': *Administrative Science Quarterly*.

Mishler, E.G. (1986). *Research Interviewing: Context and Narrative*. Cambridge: Harvard University Press.

Neuman, Lawrence. (2003). 'Social Research Methods': *Qualitative and Quantitative Approaches, Fifth Edition*. United States: Pearson Education, Inc.

Ohmae, Kenichi. (1995). *The End of The Nation-State: The Rise of Regional Economics*. New York: Free Press.

PBB, Resolusi 2504. (n.d.). *Agreement Between The Republic of Indonesia and The Kingdom of the Netherlands Concerning West New Guinea*. 1 Desember 2014. <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/256/38/IMG/NR025638.pdf?OpenElement>

Polanyi, Karl. (1944). *The Great Transformation: The*

- Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- Robinson, William I. (2004). *A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in A Transnational World*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Ruggie, John Gerard. (1982). International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in The Postwar World. *International Organizations*, 36(2)
- Schwartzmantel, John. (1998). *The Age of Ideology: Political Ideologies from The American Revolution to Postmodern Times*. New York: New York University Press.
- Schulze, Kirsten E. (2002). Laskar Jihad and The Conflict in Ambon. *The Brown Journal of World Affairs*.
- Shaw, Robert. (2008). Aceh's Struggle for Independence: Considering the Role of Islam in A Separatist. *The Fletcher School Online Journal on Southwest Asia and Islamic Civilization*.
- Usman, A. Rani. (2003). *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Weber, Max. (1978). *Economy and Society*, Vol. 1, Berkeley: University of California Press (Guenther Roth and Claus Wittich, eds.).